



JUDISIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Siaran Pers

Periode : Mei 2011

Edisi : 19 Mei 2011

Parlemen Nasional mempersoalkan Laporan PNUD yang menuduh PM Xanana menjadi kendala bagi pembangunan

Pada tanggal 5 Mei 2011, Parlemen Nasional melalui Kubu AMP sangat mempersoalkan sebuah dokumen internal dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Programa Nasoens Unidas ba Dezenvolviementu - PNUD) bersama dengan badan UN lain (UNCDF, UNEST dan DGSU) yang mengindikasikan bahwa Perdana Menteri Xanana Gusmão yang menjadi kendala bagi perkembangan Negara Hukum Republik Demokratik Timór Léste.

Direktur sementara JSMP Flora Soriano Menezes mengatakan bahwa *meskipun sedikit prihatin dengan laporan tersebut, namun laporan tersebut mencerminkan makna dan pesan kritis terhadap para lembaga-lembaga berdaulat untuk menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Konstitusi. Oleh karena itu, ia meminta kepada semua institusi untuk melihat dan mempertimbangkan laporan ini sebagai rujukan/referensi tambahan bagi semua institusi terkait sebagai sebuah bahan reflektif.*

Laporan ini dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2011, PNUD mencoba mengangkat hasil pemantauan mereka terhadap jalannya pemerintahan RDTL. Laporan ini berjumlah 9 halaman, yang dikeluarkan melalui websitenya Diáriu Tempo Semanal. pada

Karena dokumen tersebut, situasi di Parlemen Nasional sedikit menegang ketika Fretilin menggunakan dokumen PNUD ini sebagai materi dalam pernyataan politik pada sidang pleno dengan menuduh ketidakmampuan pemerintahan AMP, dan mengingat kembali laporan tersebut,

terlebih pada halaman 9 yang menyatakan bahwa PM Xanana menjadi hambatan besar terhadap perkembangan pemerintahan Demokratik di Negara Hukum yang Demokratis di Timór Léste.

Dokumen ini menyatakan bahwa badan eksekutif, terlebih Perdana Menteri Xanana Gusmão mencoba untuk mengambil peranan lebih besar di Parlemen dan Pengadilan, yang berarti bahwa Perdana Menteri selalu melakukan tekanan terhadap pengadilan dan Parlemen dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya seperti kasus Maternus Bere dan melakukan penyerangan terhadap putusan pertama dari Pengadilan Administrasi pada tahun 2010, yang mana Negara hukum (rule of law) menjadi berkurang dan *rule of Prime Minister*lah yang lebih besar

Fretilin menganggap laporan ini adalah benar karena sesuai dengan kondisi sebenarnya di Timór Léste, karena seringkali pemerintah *de facto* AMP mengabaikan Konstitusi dengan tidak mendengarkan badan legislatif sebagai badan yang paling tinggi. .

Pada bagian lain, Kubu AMP di Parlemen Nasional termasuk Presiden Parlemen Nasional Fernando Lasama, sangat prihatin dengan laporan atau dokumen tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan rinci dari pihak ONU/PNUD. Menurut Lasama, bahwa walaupun dalam realitasnya, pihaknya mengakui bahwa masih terdapat kelemahan di beberapa aspek, namun tidak pernah ada keinginan dan PM Xanana untuk mengacaukan negara ini. Beberapa anggota AMP bahkan menganggap dokumen atau laporan tersebut sebagai sebuah dendam politik yang diluncurkan dari pihak tertentu untuk tetap melanjutkan atau mempertahankan mandatnya yang akan segera berakhir.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Flora Soriano Menezes

Direktur sementara JSMP

Alamat e-mail: alol@jsmp.minihub.org

Telpon: 3323883